

PENGUJIAN TERHADAP KUALITAS PENGUNGKAPAN CSR DI INDONESIA

Dian Yuni Anggraeni
dianyuni12@gmail.com
Chaerul D. Djakman
Universitas Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify the quality of corporate social responsibility disclosure within sustainability report in Indonesia for 2012-2014. The disclosures made by corporations are varies across industries, so this study also identifies the quality of corporate social responsibility disclosure across different types of industry. This study use content analysis to identify whether those informations are qualitative or quantitative. The study shows that the informations disclosed more quantitative than qualitative because the information tags along with the quantitative data in terms of currency, weight, volume, size, etc. It also finds that even most of them use GRI as their standard, but the disclosure made by the corporation does not adequately cover the informational needs of stakeholders. However, the increasing disclosure trends can be considered as a first step toward improved corporate social responsibility disclosure. The increasing disclosure trends can be considered as the fact that corporates in Indonesia have increasing their interest in social and environmental problems and dominated by high profile industry. The study therefore supports the need for a suitable framework for corporate social responsibility disclosure, so the stakeholders can use it as credible information.

Key words: disclosure quality, sustainability, CSR, legitimacy theory, stakeholder theory

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan keberlanjutan perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2012-2014. Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan di setiap industri berbeda-beda, oleh karena itu penelitian ini juga menganalisis secara sub sampel industri agar dapat mengetahui kualitas informasi perusahaan di masing-masing industri. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang diungkapkan lebih didominasi oleh informasi yang bersifat kuantitatif. Artinya, perusahaan bukan hanya menyajikan informasi tanggung jawab sosial secara narasi saja, namun juga menyertakan data numeriknya seperti dalam mata uang, bobot, volume, ukuran, dan lain sebagainya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar sampel menggunakan GRI sebagai acuan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, namun informasi yang disajikan belum mencakup keseluruhan indikator GRI sehingga kebutuhan *stakeholder* atas informasi tanggung jawab sosial belum dapat terpenuhi dengan maksimal. Namun demikian, peningkatan tren pengungkapan mengindikasikan adanya langkah perbaikan terhadap kualitas informasi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Meningkatnya perusahaan dalam menerbitkan laporan keberlanjutan menunjukkan bahwa semakin tingginya minat perusahaan di Indonesia mengenai isu sosial dan lingkungan, khususnya pada perusahaan yang termasuk ke dalam industri *high profile*.

Kata kunci: kualitas pengungkapan, keberlanjutan, CSR, teori legitimasi, teori *stakeholder*

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) memiliki

daya tarik untuk meningkatkan nilai perusahaan (Roberts, 1992; Suchman, 1995; Clarkson, 1995; Cormier *et al.*, 2011; Kuo dan

Chen, (2013). Pada tahun 2014, Nielsen Global Survey menginisiasikan suatu survei *online* mengenai kecenderungan konsumen dalam memilih suatu produk. Hasilnya menunjukkan bahwa, 55% konsumen akan membeli produk dan jasa dari perusahaan yang berkomitmen terhadap isu sosial dan lingkungan. Oleh sebab itu, perusahaan semakin berlomba-lomba untuk memberikan kesejahteraan terhadap lingkungan dan sosial mereka dengan berbagai aktivitas CSR.

Ragam aktivitas CSR diwadahi dalam suatu laporan. Beberapa kata didefinisikan untuk menggambarkan informasi mengenai tanggung jawab social perusahaan. Laporan sosial, laporan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility (CSR) report*), laporan keberlanjutan, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, secara garis besar informasi yang disertakan dalam laporan tersebut bertujuan untuk mengelaborasi berbagai aktivitas serta hasil pencapaian perusahaan untuk melestarikan lingkungan dan sosial dengan tidak lupa untuk mempertimbangkan dampak ekonominya.

Laporan CSR merupakan suatu narasi perusahaan yang menunjukkan informasi mengenai aktivitas, aspirasi dan citra perusahaan tentang lingkungan, pegawai, pelayanan konsumen, penggunaan energi, kesetaraan, bisnis yang wajar, tata kelola perusahaan, dan lain-lain (Gray *et al.*, 2001). Salah satu manfaat dari laporan CSR ialah dapat digunakan sebagai salah satu media perusahaan dalam berkomunikasi dengan *stakeholders*. Agar komunikasi berjalan efektif, informasi yang diberikan harus relevan dengan kebutuhan pembaca (*stakeholders*).

Di Indonesia, perusahaan diwajibkan untuk turut aktif dalam pelaksanaan aktivitas CSR. Hal tersebut tertuang dalam berbagai regulasi (berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik melalui Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK nomor: Kep-431/BL/2012, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas). Namun demikian, bentuk serta konten laporan CSR cenderung bervariasi. Hal tersebut terjadi karena belum ada aturan resmi dalam menyajikan laporan kegiatan CSR. Hal ini juga disepakati oleh Jain *et al.* (2015) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa belum ada kontrol legislatif yang jelas mengenai pelaporan CSR di negara-negara kawasan Asia Pasifik. Berdasarkan keadaan tersebut, maka muncul kekhawatiran akan kualitas pelaporan CSR. Gunawan (2015) juga mengemukakan bahwa masih terdapat *gap* antara informasi yang diekspektasikan oleh *stakeholder* dengan yang dilaporkan oleh perusahaan.

Beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa informasi CSR yang diungkapkan perusahaan masih terbatas pada informasi yang bersifat naratif dan deskriptif (Fatima *et al.*, 2015; Raar, 2007; Sen *et al.*, 2011). Raar (2007) menemukan bahwa sebanyak 70% perusahaan mengungkapkan informasi CSR secara deskriptif atau penjelasan secara kualitatif, kemudian terdapat 16% perusahaan yang memberikan kombinasi informasi antara kualitatif dan kuantitatif. Di India, sebanyak 74% pengungkapan CSR ialah bersifat kualitatif, dan sisanya bersifat kuantitatif (Sen *et al.*, 2011). Fatima *et al.* (2015) mengemukakan bahwa kualitas informasi CSR yang diungkapkan masih rendah, apalagi ketika masih belum ada regulasi yang menunjang dalam mengatur pemberian informasi tersebut kepada publik. Kondisi ini direspon dengan munculnya berbagai institusi yang membuat suatu kerangka bagi perusahaan dalam melaporkan aktivitas CSR mereka. Berbagai macam organisasi, baik pemerintah maupun swasta dan baik nasional maupun internasional, yang peduli terhadap sosial dan lingkungan,

menawarkan standar untuk digunakan perusahaan dalam melaporkan aktivitas mereka. Berdasarkan keadaan tersebut, maka muncul kekhawatiran akan kualitas konten informasi yang diungkapkan perusahaan. Kondisi ini direspon dengan munculnya berbagai institusi yang membuat suatu kerangka bagi perusahaan dalam melaporkan aktivitas CSR mereka, seperti *Global Reporting Initiative* (GRI), FTSE4Good, ISO 14001, dan lain-lain.

Jenis atau profil perusahaan menjadi salah satu determinan kualitas pengungkapan CSR (Roberts, 1992; Hackston dan Milne, 1996; Zuhroh dan Sukmawati, 2003; Sayekti, 2011). Perusahaan yang tergolong dalam *high profile* memiliki potensi risiko lingkungan, sosial, persaingan, dan politik yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan *low profile*. Risiko tersebut muncul karena aktivitas operasional perusahaan yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dengan pihak-pihak lainnya. Sen *et al.* (2011) mengatakan bahwa pengungkapan informasi CSR merupakan salah satu informasi krusial bagi perusahaan *high profile* karena hal tersebut menunjukkan tingkat partisipasi mereka terhadap isu CSR. Kuo dan Chen (2013) mengklaim bahwa perusahaan yang termasuk kedalam industri *high profile* dapat memperbaiki legitimasinya dan memuaskan kepentingan *stakeholder* dengan menerbitkan laporan CSR. Secara konten, perusahaan yang memberikan informasi bahwa mereka melakukan upaya untuk memitigasi kerusakan lingkungan dan sosial akan meningkatkan legitimasi lingkungan dan sosial mereka.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas pengungkapan laporan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) pada periode 2012-2014. Perusahaan yang menerbitkan laporan tersebut mengindikasikan bahwa mereka memiliki perhatian khusus terhadap keberlanjutan usahanya, bukan hanya dilihat dari aspek

profit, namun juga aspek *planet* (lingkungan) dan *people* (sosial) sebagaimana tertuang dalam *Triple Bottom Line*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif dengan menganalisis konten skala 0-3 pada setiap laporan keberlanjutan perusahaan dan dibandingkan dengan indikator-indikator yang ada pada GRI generasi keempat (G4). GRI G4 dipilih karena standar tersebut ialah yang paling banyak digunakan oleh entitas sebagai acuan dalam menyusun laporan keberlanjutan (KPMG, 2015). Penelitian ini juga menganalisis demografi kualitas pengungkapan CSR berdasarkan jenis industri sehingga pemahaman mengenai kedalaman kualitas pengungkapan informasi CSR di Indonesia akan lebih mendalam.

Penelitian ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama memberikan *review* singkat mengenai penelitian ini. Bagian kedua memberikan penjabaran dan analisa mengenai studi literatur penelitian sebelumnya diberbagai negara. Bagian ketiga membahas metode yang digunakan dalam penelitian. Bagian keempat memberikan analisa hasil penelitian dan penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan.

TINJAUAN TEORETIS

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* (CSR))

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan hadir sebagai suatu respon akan kekhawatiran isu keberlanjutan suatu organisasi. Campbell (2007) menyatakan bahwa jika perusahaan mengisolasi tujuan kesejahteraan sosial serta lingkungan dan hanya berfokus pada target peningkatan profit saja, maka tidak heran jika perusahaan tersebut tidak *sustain*.

Roberts (1992) mengatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ialah suatu kebijakan atau tindakan yang dapat mengidentifikasi perusahaan sebagai entitas yang peduli terhadap masalah sosial. Selanjutnya, Baron (2001) dan Davis *et al.* (2005) menyatakan bahwa terkadang CSR didefinisikan sebagai suatu “kontrak sosial”

antara bisnis dan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi keduanya. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial ialah suatu perangkat kebijakan, program, dan inisiatif lainnya yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi sosial dan lingkungan namun tidak mengabaikan tujuan utama entitas itu sendiri

Berdasarkan *stakeholder theory*, kepentingan *stakeholder*, selain pemegang saham, juga menjadi perhatian dari keberadaan organisasi (Ansoff, 1965 dalam Roberts, 1992). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa salah satu objektif utama hadirnya perusahaan ialah untuk menyeimbangkan berbagai konflik kepentingan antar *stakeholder* perusahaan dan CSR dapat dijadikan sebagai alat penyeimbang antara kedua pihak tersebut.

Beragam definisi untuk menerjemahkan *stakeholder*. Clarkson (1995) menyatakan bahwa *stakeholder* merupakan individu atau kelompok yang memiliki, atau menyatakan, kepemilikan, hak, atau kepentingan di dalam perusahaan dan aktivitasnya, baik di masa lalu, sekarang, atau yang akan datang. Kemudian, Roberts (1992) menyebutkan bahwa *stakeholder* perusahaan meliputi pemegang saham, kreditur, pegawai, pelanggan, pemasok, organisasi masyarakat, serta pemerintah. Freeman (1984) dalam (Sayekti, 2011), mendefinisikan *stakeholder* sebagai suatu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi karena adanya organisasi. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa organisasi dengan seluruh elemen kebijakannya dan *stakeholder* memiliki keterkaitan, yaitu ketika dipengaruhi oleh *stakeholder* dan ketika mempengaruhi mereka.

CSR mengandung makna bahwa entitas mengemban tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung integritas, dan tidak melakukan pelanggaran hukum lainnya (Roberts, 1992). Melalui pengungkapan aktivitas CSR, perusahaan berkesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai berbagai hal yang mendukung

kesejahteraan pemegang saham, pegawai, pemasok, konsumen, regulator, serta masyarakat sekitar yang bersinggungan secara langsung dengan aktivitas perusahaan sehari-hari.

Keadaan sosial dan lingkungan tidak dapat diisolasi dengan kepentingan suatu entitas begitu saja. Entitas dituntut untuk dapat mewadahi kepentingan sekitarnya hingga pada akhirnya kepentingan entitas sendiri dapat tercapai dengan maksimal. Oleh sebab itu, pemetaan kepentingan *stakeholders* merupakan suatu agenda penting bagi perusahaan. Sehingga dapat terbentuk jalinan komunikasi yang baik sebagai salah satu alat pengikat hubungan kedua belah pihak. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa CSR berfungsi sebagai suatu penyeimbang antara kepentingan para *stakeholder* dan perusahaan itu sendiri.

Teori lain yang mendasari hadirnya CSR ialah teori legitimasi. Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang mendasari inisiasi perusahaan secara sukarela dalam mengungkapkan laporan CSR (Luo *et al.*, 2013). Legitimasi erat kaitannya dengan berbagai aktivitas yang dilakukan entitas, sehingga persepsi atau asumsi tersebut dapat tercipta.

Deegan (2002) mengatakan bahwa teori legitimasi ialah ketika perusahaan akan bereaksi sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan tersebut berada. Berdasarkan pemahaman tersebut, teori ini fokus pada strategi-strategi perusahaan dalam mengelola berbagai ekspektasi yang akan berdampak pada perusahaan agar mendapatkan status legal. Salah satu alat untuk mendapatkan status tersebut ialah aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, risiko risiko penurunan reputasi juga dapat diminimalisir dengan patuh pada regulasi dan norma sosial serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan beroperasi. Sebagai upaya dalam mendapatkan legitimasi masyarakat, Suaryana (2011) menyatakan

bahwa perusahaan akan melakukan beragam aktivitas sosial dan lingkungan. Aktivitas tersebut menjadikan suatu upaya perusahaan dalam memenuhi harapan masyarakat akan manfaat hadirnya perusahaan yang berlokasi di wilayah mereka. Namun, ketika perusahaan gagal untuk memenuhi harapan masyarakat, maka akibatnya akan berbanding terbalik, yaitu hilangnya legitimasi terhadap perusahaan, sehingga perusahaan pun akan kehilangan dukungan dari mereka.

Ahmad dan Hossain (2015) mengatakan bahwa profitabilitas perusahaan juga akan terpengaruh oleh adanya *gap* atau celah legitimasi antara perusahaan dan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena jika masyarakat merasa mendapatkan kerugian akan adanya perusahaan, maka mereka dapat saja memboikot hasil produksi perusahaan tersebut. Dalam rangka meminimalisir *gap* tersebut, Cho dan Patten (2007) mengatakan bahwa pengungkapan lingkungan dalam laporan keuangan dapat dijadikan *tools* bagi perusahaan untuk mendapatkan legitimasi.

Almilia dan Wijayanto (2007) mengatakan bahwa berdasarkan perspektif masyarakat, perusahaan dianggap sebagai entitas yang dapat menghasilkan berbagai kesempatan yang baik, seperti terbukanya lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi, penyumbang pajak untuk membangun infrastruktur, pemberian santunan, dan lain-lain, namun, tak jarang orientasi perusahaan hanya mengedepankan peningkatan keuntungan bagi dirinya sendiri. Sehingga, perusahaan mengesampingkan keadaan sosial dan bahkan menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal.

Pelaporan Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility (CSR)*)

Pelaporan CSR menjadi salah satu instrumen transparansi perusahaan dalam mengartikulasikan bagaimana peran mereka

untuk memenuhi kepentingan berbagai *stakeholders*, bukan hanya kepentingan pemegang saham. Beattie *et al.* (2004) menyatakan bahwa model pelaporan bisnis membutuhkan perbaikan agar transparansi dan akuntabilitas perusahaan meningkat, yaitu dengan memberikan informasi dan perubahannya yang diperlukan oleh pasar. Gelb dan Strawser (2001) mengatakan bahwa perusahaan yang lebih respon terhadap aktivitas sosial akan menyediakan informasi yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang kurang berkomitmen dengan aktivitas sosial. Hasil ini juga didukung oleh Wiseman (1982) yang menemukan adanya pengaruh positif antara pengungkapan CSR dan aktivitas aktual CSR.

Berbagai macam organisasi yang peduli terhadap sosial dan lingkungan, menawarkan standar untuk digunakan perusahaan dalam melaporkan aktivitas mereka. Salah satunya ialah organisasi yang memiliki inisiasi untuk memberikan pedoman bagi perusahaan dalam melaporkan keberlanjutan usaha (*sustainability report*), yaitu *Global Reporting Initiative (GRI)*. Laporan keberlanjutan digunakan sebagai salah satu cara bagi perusahaan untuk lebih *sustain* dan turut berkontribusi dalam perkembangan keberlanjutan.

Awal mulanya, GRI dibentuk di Boston pada tahun 1997. Organisasi ini berinduk pada organisasi non-profit di Amerika Serikat, yaitu *The Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)* dan *The Tellus Institute*.

Organisasi ini menerbitkan standar untuk laporan keberlanjutan atau *sustainability report*. Standar yang dikeluarkan oleh GRI, yang sekarang sudah memasuki generasi keempat (G4), menjadi salah satu panduan utama pelaporan keberlanjutan perusahaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pedoman pelaporan generasi pertama dipublikasikan pada tahun 2000. Kemudian, seiring berjalannya waktu, GRI sudah mulai terpisah dan berdiri sendiri (institusi independen) hingga pedoman pelaporan generasi kedua hadir pada tahun

2002 di Johannesburg pada *World Summit on Sustainable Development*. Pedoman ini dikenal juga dengan sebutan G2. Selanjutnya, G3 dipublikasikan pada tahun 2006, dalam perkembangan ini diprakarsai oleh lebih dari 3.000 pelaku bisnis, kelompok masyarakat, dan serikat pekerja. Agar lebih memaksimalkan standar pelaporan keberlanjutan perusahaan, pada Mei 2013 dipublikasikan pedoman GRI terbaru, yaitu generasi keempat atau G4.

Dikutip dari *website* resmi GRI (www.globalreporting.org), G4 dirancang agar dapat diterapkan secara universal di semua jenis dan sektor organisasi, baik yang berskala besar maupun kecil, di seluruh dunia. G4 mencakup rujukan ke kerangka lain yang dikenal luas, dan dirancang sebagai kerangka konsolidasian untuk kinerja pelaporan dengan berbagai standar dan norma keberlanjutan. Hal ini mencakup harmonisasi dengan kerangka global penting lain, termasuk Pedoman OECD (*Organisation for Economic Co-Operation and Development*) untuk Perusahaan Multinasional, Prinsip Global Compact PBB, dan Prinsip Pedoman Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB.

Untuk menghasilkan laporan yang lebih tepat sasaran, G4 memosisikan konsep materialitas sebagai pusat pelaporan keberlanjutan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa G4 mendorong perusahaan untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang relevan agar dapat mencapai tujuan perusahaan untuk keberlanjutan dan mengelola dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. GRI menganggap bahwa penting bagi perusahaan untuk mengungkapkan serta melaporkan keberlanjutan perusahaan, karena dengan adanya laporan keberlanjutan dapat memberikan pengungkapan tentang dampak terpenting suatu perusahaan/ organisasi (baik positif atau negatif) terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan menggunakan pedoman ini, entitas diharapkan dapat menghasilkan informasi yang andal, relevan, dan terstandardisasi sehingga dapat digunakan untuk menilai peluang dan risiko, serta memungkinkan

pengambilan keputusan yang lebih tepat bagi perusahaan itu sendiri maupun pihak yang memiliki kepentingan lainnya, namun demikian, bentuk laporan CSR tersebut masih sangat bervariasi karena belum ada aturan resmi dalam menyajikan kegiatan CSR. Hal tersebut juga disetujui oleh Jain *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa di negara-negara kawasan Asia Pasifik, belum ada kontrol legislatif yang jelas mengenai pelaporan CSR. Berdasarkan keadaan tersebut, maka muncul kekhawatiran akan kualitas pelaporan CSR. Gunawan (2015) juga menemukan bahwa masih terdapat *gap* antara informasi yang diekspektasikan oleh *stakeholder* dengan yang dilaporkan oleh perusahaan.

Informasi yang diungkapkan perlu didukung oleh data-data yang akurat sehingga informasi tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan masih terbatas pada informasi yang bersifat deskriptif saja (Fatima *et al.*, 2015; Raar, 2007; Sen *et al.*, 2011). Lebih lanjut, Raar (2007) menyatakan bahwa 70% perusahaan mengungkapkan informasi CSR secara deskriptif atau penjelasan secara kualitatif, sedangkan 16% lainnya memberikan kombinasi informasi antara kualitatif dan kuantitatif. Hal tersebut juga disetujui oleh penemuan Sen *et al.* (2011) pada perusahaan *high profile* di India, 74% bersifat kualitatif, 22% mengungkapkan dampak secara keuangan, dan 4% informasi yang bersifat fisik. Berdasarkan pemaparan tersebut, Fatima *et al.* (2015) menyimpulkan bahwa kualitas informasi CSR yang diungkapkan masih rendah, apalagi ketika masih belum ada regulasi yang menunjang dalam mengatur pemberian informasi tersebut kepada publik.

Determinan Pelaporan

Jenis industri menjadi suatu determinan demografi informasi CSR yang diungkapkan oleh perusahaan. Perusahaan yang *high*

profile ialah perusahaan yang berpotensi memiliki tingkat risiko lingkungan, sosial, persaingan, dan politik tinggi sehingga profil industri ini akan mendapatkan perhatian publik lebih besar daripada profil industri lainnya (*low profile*). Risiko tersebut muncul karena aktivitas operasional perusahaan yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dengan kepentingan luas. Sen *et al.* (2011) mengatakan bahwa pengungkapan informasi biaya pengolahan limbah dan tanggung jawab lingkungan lainnya merupakan salah satu informasi krusial bagi perusahaan *high profile* karena hal tersebut menunjukkan tingkat partisipasi mereka terhadap kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, Kuo dan Chen (2013) mengklaim bahwa perusahaan yang termasuk kedalam industri *high profile* dapat memperbaiki legitimasinya dan memuaskan kepentingan stakeholder dengan menerbitkan laporan CSR.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012 sampai dengan periode 2014. Terdapat beberapa alasan mengenai pemilihan awal periode pengamatan dalam penelitian ini. Pertama, pada 4 April 2012, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang pada pasal dua dinyatakan bahwa selaku subjek hukum, setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kedua, pada 1 Agustus 2012 terdapat revisi Peraturan Bapepam-LK X.K.6 mengenai kewajiban perusahaan publik untuk mengungkapakan informasi tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan. Campbell (2007) mengungkapkan bahwa salah satu dorongan perusahaan untuk melakukan CSR ialah ketatnya regulasi oleh suatu negara. Oleh sebab itu, karena penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan saja, maka pemilihan tahun tersebut di-

anggap tepat. Rentang waktu tiga tahun tersebut diharapkan cukup representatif untuk memberikan analisis kualitas pengungkapan CSR dalam penelitian ini.

Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan saja agar tidak terjadi kesenjangan antara perusahaan yang sudah dan belum menerbitkan laporan tersebut (Holland dan Foo, 2003). Sampel tersebut juga dipilih karena fokus penelitian ialah untuk mengetahui alasan perusahaan memberikan informasi tanggung jawab sosial mereka, dan informasi yang komprehensif tersebut bisa didapat dari laporan keberlanjutan perusahaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber. Semua data adalah bersifat sekunder dan dapat ditemukan dalam tahunan dan laporan keberlanjutan setiap perusahaan. Laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan dapat diunduh di *website* BEI (www.idx.co.id), *website* masing-masing perusahaan, dan *website* National Center of Sustainability Reporting (www.ncsr-id.org).

Untuk mendapatkan sampel yang representatif dan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian, pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan tabel 1. Berdasarkan tabel 1, pada tahun 2012, terdapat 33 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Tahun 2013, ada 39 perusahaan, dan tahun 2014 terdapat 42 perusahaan. Berdasarkan seleksi sampel tersebut, maka jumlah perusahaan yang termasuk kedalam sampel ialah 44 perusahaan dan jumlah observasi (perusahaan-tahun) dalam penelitian ini ialah 114.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai demografi kualitas pengungkapan perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan di Indonesia selama periode 2012 sampai dengan 2014, maka peneliti mengelompokkan perusahaan berdasarkan jenis industrinya masing-masing. Pengelompokkan industri ini dibagi berdasarkan *Fact Book* Bursa Efek Indonesia

periode 2012-2014. Tahapan analisis pada penelitian ini dijelaskan dalam gambar 1.

Metode analisis konten merupakan metode yang tepat untuk mengukur kualitas informasi yang diungkapkan. Metode ini suatu cara pengukuran data berupa kodifikasi informasi kualitatif menjadi suatu bentuk skala kuantitatif (Abbott dan Monsen, 1979) atau dengan mengklasifikasikan

suatu unit teks menjadi suatu kategori (Beattie *et al.*, 2004). Menurut Neuman (1991), metode analisis konten merupakan prosedur yang objektif dan sistematis untuk menggambarkan suatu pengukuran kuantitatif atas informasi yang bersifat kualitatif karena metode ini diproses melalui perhitungan dan pencatatan informasi itu sendiri.

Tabel 1
Seleksi Sampel

Kriteria	Perusahaan
Terdaftar di BEI selama periode 2012-2014	
a. 2012	451
b. 2013	477
c. 2014	498
Perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan dan memiliki data yang lengkap pada tahun:	
a. 2012	33
b. 2013	39
c. 2014	42
Jumlah Observasi (Perusahaan-Tahun)	114

Sumber: Data yang diolah

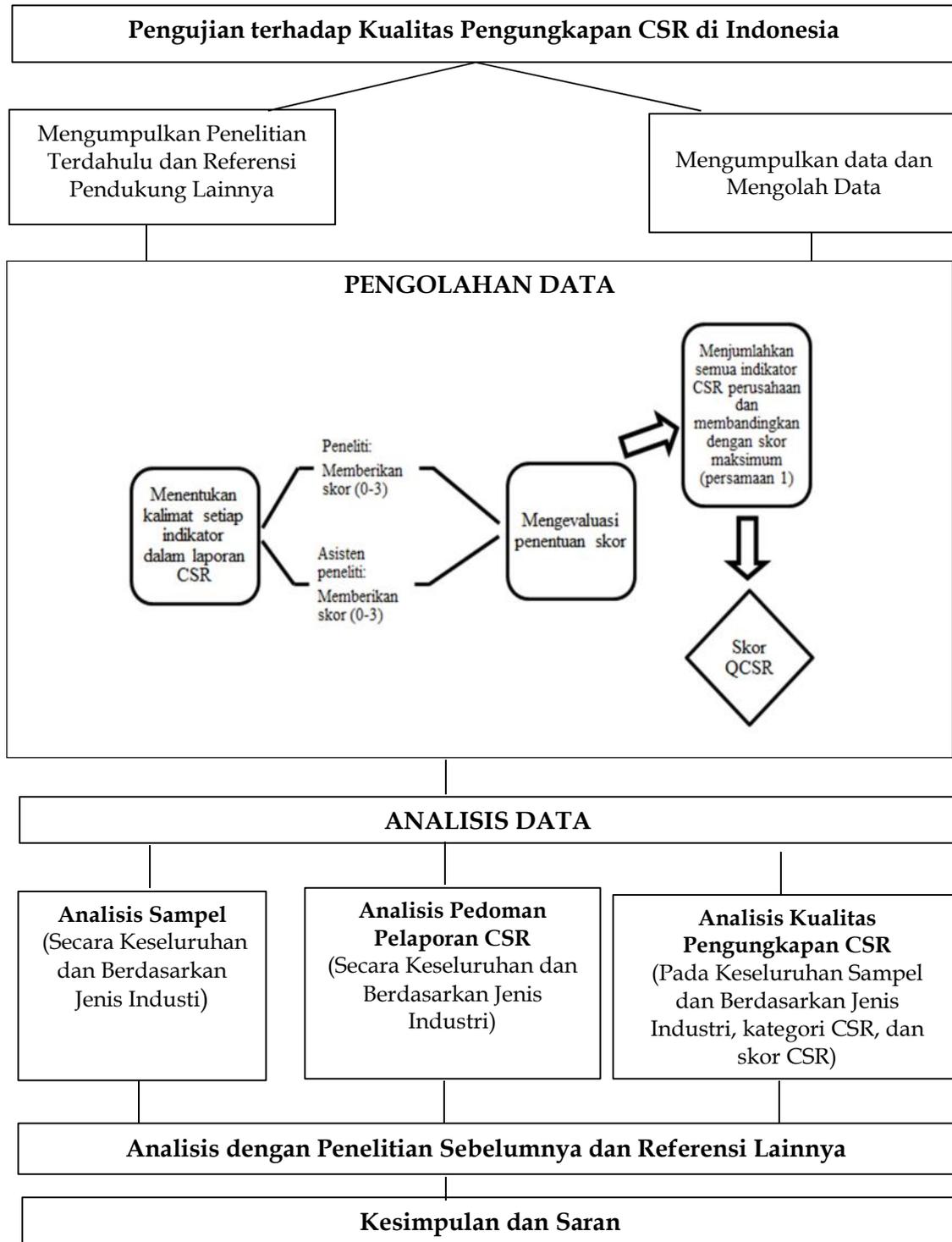
Indikator GRI merupakan suatu standar yang komprehensif dan umum digunakan oleh entitas untuk melaporkan informasi keberlanjutan usahanya (*sustainability report*). Hedberg dan Malmborg (2003) mengatakan bahwa perusahaan akan berusaha untuk menyesuaikan dengan prinsip yang berlaku umum atau kerangka umum ketika entitas berinisiasi untuk menyajikan laporan yang dapat diandalkan. GRI dipandang sebagai salah satu pedoman yang komprehensif dan dapat diandalkan karena telah dipublikasikan secara global dan didukung oleh struktur laporan yang mewakili kepentingan berbagai pihak (Kartawijaya, 2010). Dengan adanya pedoman, informasi yang dihasilkan entitas dapat menjadi lebih andal, relevan, dan terstandarisasi sehingga dapat digunakan untuk menilai peluang dan risiko, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat (Sayekti, 2011).

Untuk menyempurnakan permintaan *stakeholders*, pada saat ini GRI telah disempurnakan menjadi GRI G4, atau GRI generasi keempat, oleh karena itu, penelitian ini mengacu pada indikator pengungkapan GRI generasi keempat tersebut. Indikator G4 dapat diperoleh melalui *website* resmi GRI, yaitu www.globalreporting.org. Dalam G4, terdapat sembilan indikator yang termasuk kategori ekonomi, 34 indikator untuk kategori lingkungan, dan 48 indikator untuk kategori sosial.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan skala penilaian antara 0-3 untuk setiap indikator. Penjelasan skor tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bernilai 0: tidak mengungkapkan.
2. Bernilai 1: mengungkapkan tanpa ada penjelasan atau perusahaan hanya memberikan suatu pernyataan mengenai indikator pengungkapan tersebut secara singkat.

- 3. Bernilai 2 : mengungkapkan dan memberi penjelasan secara kualitatif.
- 4. Bernilai 3 : jika mengungkapkan dan memberi penjelasan secara kualitatif serta menyediakan data dengan nominal angka (kuantitatif) untuk setiap indikator yang diungkapkan.



Gambar 1 Tahapan Penelitian

Analisis kualitas pengungkapan CSR dilakukan dengan metode *content analysis*, yaitu suatu cara pengukuran data berupa kodifikasi informasi kualitatif menjadi suatu bentuk skala kuantitatif (Abbott dan Mosen, 1979) atau dengan mengklasifikasikan suatu unit teks menjadi suatu kategori (Beattie *et al.*, 2004). Menurut Ne man (1991), metode analisis konten merupakan prosedur yang objektif dan sistematis untuk menggambarkan suatu pengukuran kuantitatif atas informasi yang bersifat kualitatif karena metode ini diproses melalui perhitungan dan pencatatan informasi itu sendiri.

Pengukuran ini mengacu pada penelitian Jizi *et al.* (2014), Fatima *et al.* (2015), Kuo dan Chen (2013), dan Roberts (1992). Skala tersebut juga diharapkan mampu menjelaskan bagaimana kualitas informasi CSR yang diungkapkan perusahaan. Untuk meminimalisir subjektivitas dalam pemberian skor setiap indikator pengungkapan, penelitian ini dibantu oleh asisten peneliti dan kemudian skor tersebut dievaluasi kembali oleh peneliti. Selanjutnya, untuk mendapatkan indeks kualitas pengungkapan CSR perusahaan, total skor kualitas pengungkapan CSR setiap perusahaan dibandingkan dengan total skor pengungkapan maksimum. Rumusnya ialah sebagai berikut (Jizi *et al.*, 2014):

$$QCSR_i = \frac{SQCSR_i}{SQMAX} \quad (\text{Persamaan 1})$$

Keterangan:

- QCSR_i : Kualitas pengungkapan CSR perusahaan i
 SQCSR_i : Skor kualitas pengungkapan CSR perusahaan i
 SQMAX : Skor maksimum kualitas pengungkapan CSR

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pelaporan Berdasarkan Industri

Pada tahun 2012, terdapat 451 perusahaan yang tercatat di BEI. Dari keseluruhan perusahaan yang terdaftar di BEI, pada tahun 2012 hanya 7,32% (33/451 × 100) atau 33 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Pada tahun 2013, terdapat 477

perusahaan yang terdaftar di BEI, namun demikian hanya 8,18% (39/477 × 100) atau 39 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Selanjutnya, perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 ialah sebanyak 498 dan hanya 8,43% (42/498 × 100) atau 42 perusahaan saja yang menerbitkan laporan keberlanjutan, namun demikian berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan selama periode 2012, 2013, dan 2014 ialah terus meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya tren positif penerbitan laporan keberlanjutan di Indonesia karena terus menerus bertambah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan satu sinyal bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial yang tercatat dalam laporan keberlanjutan semakin diminati oleh para perusahaan.

Berdasarkan sektor industri, tabel 2 berikut ini menggambarkan sebaran sampel dalam penelitian ini. Pengelompokan industri ini dibagi berdasarkan *Fact Book* Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Berdasarkan tabel 2 tersebut, industri keuangan ialah yang paling dominan dalam penelitian ini, yaitu 9 perusahaan pada tahun 2012, 10 perusahaan pada 2013, dan 11 perusahaan pada 2014. Hasil ini dapat dijadikan kabar gembira sebagai dukungan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan untuk periode 2015-2019 karena berdasarkan tabel 2, ternyata sebelum inisiasi tersebut dilaksanakan, industri keuangan telah memberikan dukungan positif untuk menciptakan keuangan berkelanjutan melalui penerbitan *sustainability reporting*.

Terdapat dua kelompok perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan mereka. Masing-masing kelompok terdiri atas dua perusahaan. Kelompok pertama ialah Indo Agri, dari industri pertanian. Kelompok ini terdiri atas PT. Salim Ivomas Pratama Tbk. dan PP London Sumatra Indonesia Tbk. Kelompok kedua ialah Asia Pulp Paper (APP), dari *miscellaneous industry*. Kelompok ini terdiri atas PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Dan PT. Pabrik Kertas Tjiwi

Kimia Tbk. Kedua Kelompok tersebut menerbitkan laporan keberlanjutan secara konsisten dari tahun 2012-2014.

Karena keterbatasan jumlah sampel penelitian, maka setiap anggota kelompok

diperlakukan menjadi satu entitas yang diteliti, sehingga nilai kualitas pengungkapan CSR mereka ialah sama karena mereka hanya menerbitkan satu laporan keberlanjutan saja.

Tabel 2
Pelaporan Berdasarkan Industri

Industri	2012-2014			2012			2013			2014		
	Obs	%	s	Tot	%	s	Tot	%	s	Tot	%	
Pertanian	12	10.53 ^a	4	18	22.22 ^b	4	20	20 ^b	4	20	20 ^b	
Industri dasar & Kimia	10	8.77	3	63	4.76	3	60	5	4	63	6.35	
Industri Barang Konsumsi	3	2.63	1	35	2.86	0	37	0	2	38	5.26	
Keuangan	30	26.32	9	73	12.33	10	75	13.33	11	81	13.58	
Infrastruktur, Utilitas & Transportasi	15	13.16	5	39	12.82	5	45	11.11	5	50	10	
Pertambangan	17	14.91	4	32	12.50	7	37	18.92	6	39	15.38	
Miscellaneous Industry	12	10.53	4	41	9.76	4	42	9.52	4	41	9.76	
Property, Real Estate & Construction	11	9.65	3	50	6	4	54	7.41	4	54	7.41	
Perdagangan, Jasa & Investasi	4	3.51	0	100	0	2	107	1.87	2	112	1.79	
TOTAL	114	100	33	451	83.25	39	477	87.16	42	498	89.53	

Keterangan: Tabel ini menyajikan deskripsi sampel yang digunakan dalam penelitian berdasarkan tahun dan 9 jenis industri (*Fact Book IDX*). Kolom **Obs** merupakan jumlah observasi dalam penelitian berdasarkan jenis industri. Kolom **s** merupakan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jenis industri. Kolom **Total** merupakan jumlah keseluruhan perusahaan berdasarkan jenis industri yang terdaftar pada BEI setiap tahunnya.

^a $(12/114) \times 100$

^b $(4/18) \times 100$

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 2, industri pertanian memiliki jumlah pelapor yang konstan dari tahun 2012 hingga tahun 2014, yaitu 4 perusahaan. Dalam penelitian ini, industri pertanian berkontribusi sebesar 10,53%. Pada industri ini, dari 18 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012, hanya 22,22% yang menerbitkan laporan keberlanjutan, kemudian, pada tahun 2013 dan 2014, dari 20 perusahaan, hanya 20% nya saja yang menerbitkan.

Industri dasar dan kimia berkontribusi sebesar 8,77% dalam penelitian ini. Pada tahun 2012, dari 63 perusahaan jenis industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI, hanya 4,76% atau 3 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan, begitu juga pada tahun 2013, yaitu 5% perusahaan dari total keseluruhan 60 perusahaan terdaftar. Kemudian, pada tahun 2014 meningkat menjadi 6,35% atau 4 perusahaan dari total keseluruhan sebesar 63 perusahaan.

Industri barang dan konsumsi memiliki tren yang unik, yaitu terdapat penurunan pelapor pada tahun kedua penelitian, 2013. Industri ini memiliki kontribusi yang paling rendah dalam penelitian ini, yaitu sebesar 2,63%. Pada tahun 2012, dari 35 perusahaan yang terdaftar di BEI, terdapat 1 perusahaan atau 2,86% yang menerbitkan laporan keberlanjutan, kemudian, tahun 2013 tidak ada perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan meskipun jumlah total perusahaannya meningkat. Selanjutnya, pada tahun 2014, ada 2 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan dari total keseluruhan 38 perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat inkonsistensi perusahaan dalam menerbitkan laporan keberlanjutannya.

Industri keuangan merupakan industri dengan jumlah pelapor terbanyak setiap tahunnya. Dalam penelitian ini, industri keuangan berkontribusi sebesar 26,32%. Pada tahun 2012, dari 73 total keseluruhan perusahaan yang terdaftar di BEI, terdapat 9 perusahaan atau 12,33% yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Pada tahun 2013, ada 10 perusahaan atau 13,33% dari 75 perusahaan, dan pada tahun 2014 terdapat 11 perusahaan atau 13,58% dari 81 perusahaan.

Sama seperti industri pertanian, industri infrastruktur, utilitas, dan transportasi juga memiliki jumlah pelapor yang konstan selama tahun 2012 hingga 2014, yaitu sebanyak 5 perusahaan. Industri infrastruktur, utilitas, dan transportasi memberikan kontribusi sebesar 13,04% dalam penelitian ini. Pada tahun 2012, terdapat 39 perusahaan yang terdaftar di BEI, dan hanya 12,82% nya saja yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Pada tahun 2013, terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI, yaitu 45 perusahaan, namun jumlah pelapornya tetap, begitu juga pada tahun 2014.

Industri pertambangan berkontribusi sebesar 14,91% dalam penelitian ini. Pada tahun 2012, terdapat 4 perusahaan atau 12,50% yang menerbitkan laporan keberlanjutan dari 32 total keseluruhan perusahaan yang terdaftar di BEI pada industri ini, 7

perusahaan atau 18,92 dari 37 perusahaan di tahun 2013, dan menurun 1 perusahaan (menjadi 6 perusahaan) atau 15,38% di tahun 2014 dari 39 perusahaan. Hasil ini juga mengindikasikan adanya inkonsistensi pelaporan keberlanjutan perusahaan pada industri ini. *Miscellaneous industry* juga memiliki jumlah pelapor yang konstan selama tahun 2012 hingga 2014, yaitu sebanyak 4 perusahaan. Industri ini berpartisipasi sebesar 10,53% di penelitian ini. Pada tahun 2012, dari 41 perusahaan yang terdaftar di BEI, hanya 9,76% yang menerbitkan laporan keberlanjutan, kemudian, pada tahun 2013 terdapat 9,52% dari 42 perusahaan, dan 9,76% dari 41 perusahaan di tahun 2014. Industri *property, real estate*, dan konstruksi memberikan kontribusi sebesar 9,65% pada penelitian ini. Pada industri ini, dari 50 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012, ditemukan bahwa 6% atau 3 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Kemudian, di tahun 2013 terjadi peningkatan yaitu 4 perusahaan atau 7,41% dari 54 perusahaan dan di tahun 2014 ialah tetap.

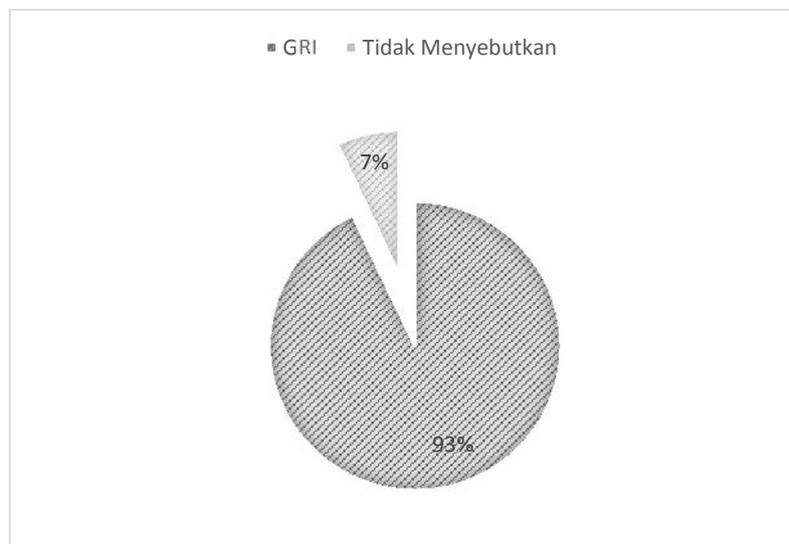
Industri terakhir ialah industri perdagangan, jasa, dan investasi yang berkontribusi sebesar 4,35% dalam penelitian ini. Pada tahun 2012, tidak ada perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan, namun pada tahun 2013 meningkat menjadi 2 perusahaan atau 1,87% dari total keseluruhan 107 perusahaan. pada tahun 2014 sebenarnya terdapat 3 perusahaan yang melaporkan laporan keberlanjutan, namun demikian satu perusahaan harus dikeluarkan dari observasi penelitian karena memiliki nilai rasio *leverage* yang negatif sehingga akan mengganggu hasil regresi, yaitu PT. Bakrie & Brothers Tbk. pada tahun 2014. Nilai negatif tersebut dikarenakan perusahaan memiliki nilai ekuitas yang minus atau disebut dengan defisiensi modal karena kerugian dari penanaman modal yang ditempatkan pada saham. Kemungkinan perusahaan tersebut menerbitkan laporan keberlanjutan untuk menjadi sinyal bagi *stakeholders* lainnya bahwa meskipun modal

mereka defisien, namun mereka memiliki kemungkinan prospek yang baik di masa yang akan datang karena aktivitas bisnis mereka telah sesuai dengan norma yang berlaku dan kesejahteraan sosial serta lingkungan mereka terjaga. Berdasarkan tabel 2 tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI setiap tahunnya, namun peningkatan tersebut tidak diiringi oleh peningkatan perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan, bahkan ada yang tidak konsisten dalam penerbitan laporan tersebut setiap tahunnya.

Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keberlanjutan belum dapat dijadikan media komunikasi yang umum dengan para *stakeholders* mereka.

Pedoman Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan

Pembahasan selanjutnya ialah mengenai pedoman pelaporan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan dan melaporkan laporan keberlanjutan mereka. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2
Acuan Laporan Keberlanjutan

Berdasarkan gambar 2, sampel penelitian ini didominasi oleh perusahaan yang menggunakan GRI sebagai acuan laporan keberlanjutan mereka. Lebih spesifik, 93% (106 observasi) menggunakan GRI, sedangkan 7% (8 observasi) lainnya tidak memberikan informasi mengenai acuan laporan keberlanjutan yang mereka gunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia, GRI dipandang sebagai salah satu pedoman yang komprehensif dan dapat diandalkan untuk memberikan informasi kepada *stakeholders* mereka. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartawijaya (2010). Hedberg dan

Malmberg (2003) juga mengatakan bahwa perusahaan akan berusaha untuk menyesuaikan dengan prinsip yang berlaku umum atau kerangka umum ketika entitas berinisiasi untuk menyajikan suatu laporan, sehingga laporan tersebut dapat menjadi acuan untuk menilai peluang dan risiko serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat, baik untuk perusahaan itu sendiri maupun *stakeholders* mereka. Hasil tersebut juga mendukung teori *stakeholder*, perusahaan berusaha untuk menyeimbangkan berbagai konflik antar *stakeholders* melalui penerbitan laporan keberlanjutan yang terstandarisasi, relevan dan handal.

Kualitas Pengungkapan CSR

Tabel 3 memberikan informasi mengenai kualitas pengungkapan CSR ber-

dasarkan jenis industri dan per periode pelaporan.

Tabel 3
Rata-Rata Kualitas Pengungkapan CSR

Rata-rata Total Skor (%)	2012			2013			2014			Total OBS
	EC	EN	SC	EC	EN	SC	EC	EN	SC	
Pertanian	65,74	35,29	30,21	52,78	41,18	32,82	56,48	52,94	33,85	
QCSR	36,42			38,77			44,21			39,80
N	4			4			4			12
Industri dasar & Kimia	85,93	66,47	60,42	76,29	57,45	41,81	72,84	57,84	49,65	
QCSR	66,67			52,21			56,24			58,37
N	3			3			4			10
Industri Barang Konsumsi	92,59	55,88	48,61	-	-	-	59,26	49,02	31,94	
QCSR	56,91			-			41,95			32,95
N	1			0			2			3
Keuangan	53,33	19,61	33,54	58,15	25,78	39,24	51,18	17,02	28,54	
QCSR	30,97			36,89			27,07			31,64
N	9			10			11			30
Infrastruktur, Utilitas & Transportasi	77,78	50,59	53,47	52,59	30,19	38,33	61,48	25,29	33,05	
QCSR	56,03			37,52			33,71			42,42
N	5			5			5			15
Pertambangan	78,71	62,01	57,12	73,15	54,41	34,46	70,89	47,62	32,72	
QCSR	62,45			46,77			43,02			50,75
N	4			7			6			17
Miscellaneous Industry	51,85	37,25	22,22	42,59	33,33	17,01	57,41	23,04	18,75	
QCSR	31,46			26,22			24,72			27,47
N	4			4			4			12
Property, Real Estate, & Construction	64,20	30,39	28,70	50,93	10,29	25,87	35,56	11,57	18,47	
QCSR	33,58			23,03			17,98			24,86
N	3			4			4			11
Perdagangan, Jasa & Investasi	-	-	-	55,56	44,12	25	51,85	29,90	32,99	
QCSR	-			35,96			34,46			23,47
N	0			2			2			4
Semua OBS	18,97	43,03	62,55	16,39	37,87	50,31	15,98	34,81	46,93	
QCSR	124,55			104,57			97,72			40,35
Total OBS	33			39			42			114

Keterangan: Tabel ini merupakan demografi rata-rata kualitas pengungkapan CSR berdasarkan jenis industri, tahun pengamatan, dan kategori CSR. EC merupakan kategori ekonomi, EN merupakan kategori lingkungan, dan SC merupakan kategori sosial. OBS merupakan observasi.

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 3, kualitas pengungkapan CSR pada sampel penelitian ini memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,4035 (40,35%). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pengungkapan CSR perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini ialah masih rendah (di bawah 50%). Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk keseluruhan sampel pada penelitian ini, informasi CSR yang terdapat pada laporan keberlanjutan periode 2012 memiliki nilai rata-rata kualitas pengungkapan CSR tertinggi bila dibandingkan dengan tahun lainnya, 2013 dan 2014. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa meskipun jumlah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun demikian peningkatan tersebut tidak diikuti dengan kualitas pelaporan mereka.

Berdasarkan hasil analisis dalam tabel 3, dapat dikatakan bahwa peningkatan jumlah pelapor menjadi salah satu penyebab menurunnya nilai rata-rata kualitas pelaporan CSR per tahunnya. Berdasarkan kategori CSR, nilai rata-rata tertinggi ada pada kategori sosial karena dalam kategori ini memiliki jumlah indikator pengungkapan yang paling banyak bila dibandingkan dengan kategori ekonomi (9 indikator) dan lingkungan (34 indikator), yaitu 48 indikator. Posisi kedua diduduki oleh kategori lingkungan, dan yang terakhir ialah kategori ekonomi.

Industri pertanian memiliki tren kualitas pengungkapan CSR yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012, skor kualitas pengungkapan CSR industri ini ialah 36,42%, pada tahun 2013 sebesar 38,77%, dan pada tahun 2014 sebesar 44,21%. Lebih spesifik, terdapat peningkatan kualitas pengungkapan pada kategori lingkungan dan sosial pada setiap tahunnya. Untuk kategori lingkungan, pada tahun 2012 skor kualitas pengungkapannya ialah sebesar 35,29%, tahun 2013 sebesar 41,18%, dan tahun 2014 sebesar 52,94%. Untuk kategori sosial, pada tahun 2012 ialah sebesar 30,21%, pada tahun 2013 ialah sebesar 32,82%, dan 33,85% di tahun 2014. Sementara itu, untuk

kategori ekonomi trennya fluktuatif, yaitu menurun di tahun 2013 dan kemudian meningkat pada tahun 2014.

Meskipun tidak ada perubahan jumlah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan, pada tahun 2013 industri dasar dan kimia mengalami penurunan skor kualitas pengungkapan CSR. Nilai skor kualitas pengungkapan CSR pada tahun 2012 ialah sebesar 66,67%, tahun 2013 menurun menjadi 52,21%, dan meningkat lagi ditahun 2014, yaitu 56,24%. Kategori ekonomi memiliki nilai skor yang menurun setiap tahunnya, 85,93% di tahun 2012, 76,29% di tahun 2013, dan 72,84% pada tahun 2014. Kategori lingkungan juga mengalami tren yang sama, 66,47% di tahun 2012, 57,45% di tahun 2013, dan 57,84% di tahun 2014. Untuk kategori sosial, kualitas pengungkapan CSR mengalami penurunan hanya pada tahun 2013. Tahun 2012 skornya ialah 60,42%, 41,82% pada tahun 2013, dan 49,65% di tahun 2014.

Tidak ada perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan pada periode 2013 dalam industri barang konsumsi. Industri ini memiliki tren rata-rata skor kualitas pengungkapan CSR yang menurun selama periode 2012 hingga 2014. Pada tahun 2012, rata-rata skor pengungkapan CSR ialah sebesar 56,91% dengan hanya 1 perusahaan saja. Pada tahun 2014 nilai rata-rata skornya ialah sebesar 41,95%, dengan 2 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Hasil tersebut memberikan bukti bahwa peningkatan jumlah pelapor tidak diikuti oleh peningkatan kualitas pengungkapan dalam laporan keberlanjutan tersebut. Dalam industri ini, kategori ekonomi memiliki rata-rata skor yang paling tinggi bila dibandingkan dengan kategori lingkungan dan sosial setiap tahunnya. Kategori sosial merupakan rata-rata skor yang terendah setiap tahunnya.

Pada industri keuangan, ada peningkatan rata-rata skor kualitas pengungkapan CSR di tahun 2013, namun menurun pada tahun 2014. Nilai rata-rata skor di tahun 2012 ialah sebesar 30,97%, 36,89% di tahun 2013,

dan 27,07 di tahun 2014. Dalam industri ini, kategori ekonomi menjadi kategori yang memiliki nilai skor tertinggi bila dibandingkan dengan kategori lingkungan dan sosial di setiap tahunnya. Posisi kedua ialah kategori sosial, dan yang terakhir ialah kategori lingkungan. Rata-rata skor kualitas pengungkapan CSR pada industri infrastruktur, utilitas, dan transportasi mengalami tren menurun di setiap tahunnya. Tahun 2012 nilai rata-rata skornya ialah sebesar 56,03%, kemudian menurun menjadi 37,52% di tahun 2013, dan menurun lagi sebesar 33,71% di tahun 2014. Sama seperti industri keuangan, dalam industri ini, kategori ekonomi menjadi kategori yang memiliki nilai skor tertinggi bila dibandingkan dengan kategori lingkungan dan sosial di setiap tahunnya. Posisi kedua ialah kategori sosial, dan yang terakhir ialah kategori lingkungan.

Rata-rata skor kualitas pengungkapan CSR pada industri pertambangan juga mengalami tren menurun di setiap tahunnya. Tahun 2012 nilai rata-rata skornya ialah sebesar 62,45%, kemudian menurun menjadi 46,77% di tahun 2013, dan menurun lagi sebesar 43,02% di tahun 2014. Kategori ekonomi juga menjadi kategori yang memiliki nilai rata-rata skor tertinggi, kemudian diikuti oleh kategori lingkungan, dan yang terakhir ialah kategori sosial.

Demografi *miscellaneous industry* tidak berbeda dengan industri pertambangan. Terdapat penurunan nilai rata-rata skor kualitas pengungkapan CSR setiap tahunnya, yaitu 31,46% di tahun 2012, 26,22% di tahun 2013, dan 24,72% pada tahun 2014. Kategori ekonomi juga menjadi kategori yang memiliki nilai rata-rata skor tertinggi, kemudian diikuti oleh kategori lingkungan, dan yang terakhir ialah kategori sosial.

Industri *property, real estate* dan *construction* pun mengalami tren nilai skor kualitas pengungkapan CSR yang menurun. Pada tahun 2012 ialah sebesar 33,58%, pada tahun 2013 menurun menjadi 23,03%, padahal terdapat penambahan perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Pada

tahun 2014 nilai skornya menurun lagi menjadi 17,98% dengan jumlah perusahaan yang konstan. Pada industri ini, kategori ekonomi juga menjadi kategori dengan nilai skor tertinggi. Pada tahun 2012, posisi kedua ialah kategori lingkungan, dan yang terakhir ialah kategori sosial, namun pada tahun 2013 dan 2014, posisi kedua diduduki oleh kategori sosial dan posisi terakhir ialah kategori lingkungan. Tidak ada perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan pada periode 2012 di industri perdagangan, jasa, dan investasi. Industri ini juga mengalami tren penurunan nilai rata-rata skor kualitas pengungkapan CSR setiap tahunnya. Tahun 2013 nilainya ialah 35,96% dan tahun 2014 menurun menjadi 34,46%. Pada industri ini, kategori ekonomi juga menjadi kategori dengan nilai skor tertinggi. Pada tahun 2013, posisi kedua ialah kategori lingkungan, dan yang terakhir ialah kategori sosial, namun pada tahun 2014, posisi kedua diduduki oleh kategori sosial dan posisi terakhir ialah kategori lingkungan.

Berdasarkan tabel 3 tersebut, dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata kualitas CSR tertinggi ialah industri dasar dan kimia, yaitu 58,37%. Kemudian diikuti oleh industri pertambangan (50,75%), infrastruktur, utilitas, dan transportasi (42,42%), pertanian (39,80%), industri barang dan konsumsi (32,95%), keuangan (31,64%), *miscellaneous industry* (27,47%), *property, real estate*, dan konstruksi (24,86%), dan industri perdagangan, jasa, dan investasi (23,47%). Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara deskriptif, industri *high profile* memiliki nilai rata-rata kualitas pengungkapan CSR yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan industri lainnya (*low profile*). Hasil ini didukung oleh beberapa penelitian yang menemukan bahwa perusahaan yang termasuk pada industri *high profile* akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pengungkapan CSR mereka sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kondisi lingkungan dan sosial dan untuk mendapatkan legitimasi para pihak yang berkepentingan (Roberts, 1992; Hack-

ston dan Milne, 1996; Zuhroh dan Sukmawati, 2003; Sayekti, 2011). Untuk mengetahui secara spesifik mengenai kualitas pengungkapan CSR, tabel 4 menyajikan informasi mengenai frekuensi jumlah skor yang paling banyak didapat dan yang paling sedikit didapat per kategori CSR dan per tahun amatan. Tabel 4 memberikan informasi mengenai frekuensi pengungkapan berdasarkan kategori CSR; ekonomi, lingkungan, dan social per periode pelaporan.

Berdasarkan tabel 4, pada tahun 2012, kategori ekonomi didominasi oleh skor 3, kemudian diikuti oleh skor 2, 0, dan 1. Pada kategori lingkungan, skor yang paling sering didapat ialah skor 0, kemudian diikuti oleh skor 3, 2, dan 1. Kemudian, pada kategori sosial, skor 0 ialah yang paling sering di-

dapat, kemudian diikuti oleh skor 3, 2, dan 1. Pada tahun 2013, kategori ekonomi paling sering mendapatkan skor 3, kemudian diikuti oleh skor 0, 2, dan 1. Untuk kategori lingkungan, skor yang mendominasi ialah skor 0, selanjutnya ialah skor 3, 2, dan 1. Dalam kategori sosial, skor 0 juga mendominasi, kemudian diikuti oleh skor 3, 2, dan 1.

Yang terakhir ialah pada tahun 2014. Skor yang mendominasi dalam kategori ekonomi ialah skor 3, selanjutnya diikuti oleh skor 3, 2, dan 1. Dalam kategori lingkungan, skor 0 menjadi skor yang paling sering didapat, kemudian diikuti oleh skor 3, 2, dan 1. Untuk kategori sosial, skor 0 merupakan skor yang mendominasi, kemudian diikuti oleh skor 3, 2, dan 1.

Tabel 4
Frekuensi Skor Pengungkapan CSR

Frekuensi Skor	0	1	2	3	TOTAL
Tahun 2012	1.389	135	463	1.016	3.003
Ekonomi	61	9	64	163	
Lingkungan	570	36	165	351	
Sosial	758	90	234	502	
Tahun 2013	1.966	101	469	1.013	3.549
Ekonomi	114	3	66	168	
Lingkungan	761	35	148	382	
Sosial	1.091	63	255	463	
Tahun 2014	2.223	104	473	1.022	3.822
Ekonomi	125	10	65	178	
Lingkungan	875	20	148	385	
Sosial	1.223	74	260	459	
TOTAL	5.578	340	1.405	3.051	10.374

Keterangan: Tabel ini menyajikan frekuensi nilai skor 0, 1, 2, dan 3 yang didapat per tahun dan per kategori pengungkapan CSR. Secara keseluruhan, terdapat 10.374 amatan (114 observasi × 91 indikator pengungkapan).

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 4, dapat dikatakan bahwa skor yang paling sedikit ialah skor 1, yaitu pernyataan singkat mengenai pengungkapan indikator CSR. Berbeda dari hasil penelitian Sen *et al.* (2011) di India, bila dibandingkan antara skor 2 dan 3, penelitian ini menemukan bahwa skor 3 ialah lebih

banyak daripada skor 2. Hasil ini mengindikasikan bahwa di Indonesia, informasi mengenai penjelasan secara kualitatif dan kuantitatif lebih banyak bila dibandingkan dengan pengungkapan informasi secara kualitatif saja. Hasil ini juga senada dengan penelitian yang dilakukan Fatima *et al.* (2015)

di Malaysia, namun demikian skor 0 masih mendominasi, yang berarti masih rendahnya informasi yang diungkapkan oleh sampel perusahaan dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kualitas pengungkapan laporan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang terdaftar di BEI dan menerbitkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) pada periode 2012-2014. Berdasarkan analisis sampel, perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan meningkat dari tahun 2012-2014 dan didominasi oleh industri keuangan, namun demikian, peningkatan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pengungkapan CSR. Berdasarkan analisis konten yang dilakukan dalam penelitian ini, nilai skor 0 ialah yang paling dominan, artinya tingkat pengungkapan informasi CSR perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini ialah masih rendah, namun demikian, ditemukan bahwa lebih banyak informasi yang menyajikan informasi secara kualitatif dan kuantitatif daripada kualitatif saja.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu masih rendahnya jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian karena hanya menggunakan perusahaan yang terdaftar di BEI dan menerbitkan laporan keberlanjutan selama periode 2012-2014 saja, sehingga membatasi generalisasi hasil penelitian. Penelitian ini juga hanya menggunakan laporan keberlanjutan dan tahunan perusahaan untuk menganalisis kualitas informasi CSR yang diungkapkan perusahaan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode pengamatan sehingga dapat menghasilkan sampel yang lebih banyak dan menggunakan sumber informasi CSR lainnya seperti *website* perusahaan atau berita-berita di media cetak dan elektronik mengenai aktivitas perusahaan dalam melakukan kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbot, W. F. dan R. J. Monsen. 1979. On the Measurement of Corporate Social Responsibility: Self-Reported Disclosures as a Method of Measuring Corporate Social Involvement. *The Academy of Management Journal* 22(3): 501-515.
- Ahmad, N. N. N. dan D. M. Hossain. 2015. Climate Change and Global Warming Discourses and Disclosures in the Corporate Annual Reports: A Study on the Malaysian Companies. *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 172: 246-25.
- Almilia, L. S. dan D. Wijayanto. 2007. Pengaruh Environmental Performance dan Environmental Disclosure terhadap Economic Performance. *Proceedings the 1st Accounting Conference Depok*: 1-23.
- Baron, D. P. 2001. Private Politics, Corporate Social Responsibility, and Integrated Strategy. *Journal of Economics and Management Strategy* 10(1): 7-45.
- Beattie, V., B. McInnes, dan S. Fearnley. 2004. A Methodology for Analysing and Evaluating Narratives in Annual Reports: A Comprehensive Descriptive Profile and Metrics for Disclosure Quality Attributes. *Accounting Forum* 28(3): 205-236.
- Campbell, J. L. 2007. Why Would Corporations Behave in Socially Responsible Ways? An Institutional Theory of Corporate Social Responsibility. *The Academy of Management Review* 32(3): 946-967.
- Cho, C. H. dan D. M. Patten. 2007. The Role of Environmental Disclosure as Tools of Legitimacy: A Research Note. *Accounting, Organizations, and Society* 32(7-8): 639-647.
- Clarkson, M. B. E. 1995. A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. *The Academy of Management Review* 20(1): 92-117.
- Cormier, D., M. J. Ledoux, dan M. Magnan. 2011. The Informational Contribution of Social and Environmental Disclosures

- for Investors. *Management Decision* 49(8): 1276-1304.
- Davis, M. B., R. G. Shaw, dan J. R. Etterson. 2005. Evolutionary Responses to Changing Climate. *Ecological Society of America* 86(7): 1704-1714.
- Deegan, C. 2002. Introduction: The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosure—A Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 15(3): 282-311.
- Fatima, A. H., N. Abdullah, dan M. Sulaiman. 2015. Environmental Disclosure Quality: Examining the Impact of the Stock Exchange of Malaysia's Listing Requirements. *Social Responsibility Journal* 11(4): 904-922.
- Gelb, D. S. dan J. A. Strawser. 2001. Corporate Social Responsibility and Financial Disclosure: An Alternative Explanation. *Journal of Business Ethics* 33(1): 1-13.
- Global Reporting Initiative. 2013. Pedoman Pelaporan Keberlanjutan G4. <https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Bahasa-Indonesian-G4-Part-Two.pdf>. Diakses tanggal 26 Agustus 2015.
- Gray, R., M. Javad, D. M. Power, dan C. D. Sinclair. 2001. Social and Environmental Disclosure and Corporate Characteristics: A Research Note and Extension. *Journal of Business Finance and Accounting* 28(3-4): 327-356.
- Gunawan, J. 2015. Corporate Social Disclosures in Indonesia: Stakeholders' Influence and Motivation. *Social Responsibility Journal* 11(3): 535-552.
- Hackston, D. dan M. J. Milne. 1996. Some Determinants of Social and Environmental Disclosures in New Zealand Companies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 9(1): 77-108.
- Hedberg, C. J. dan F. V. Malmberg. 2003. The Global Reporting Initiative and Corporate Sustainability Reporting in Swedish Companies. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 10(3): 153-164.
- Holland, L. dan Y. B. Foo. 2003. Differences in Environmental Reporting Practices in the UK and the US: The Legal and Regulatory Context. *The British Accounting Review* 35(1): 1-18.
- Jain, A., M. Keneley, dan D. Thomson. 2015. Voluntary CSR Disclosure Works! Evidence from Asia-Pacific Banks. *Social Responsibility Journal* 11(1): 2-18.
- Jizi, M. I., A. Salama, R. Dixon, dan R. Stratling. 2014. Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from US Banking Sector. *Journal of Business Ethics* 125(4): 601-615.
- Kartawijaya, I. 2010. Determinan Kinerja Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Asia Tenggara. Tesis. Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- KPMG. 2015. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015. KPMG.
- Kuo, L. dan V. Y. J. Chen. 2013. Is Environmental Disclosure an Effective Strategy on Establishment of Environmental Legitimacy for Organization?. *Management Decision* 51 (7): 1462-1487.
- Luo, L., Q. Tang, dan Y. C. Lan. 2013. Comparison of Propensity for Carbon Disclosure between Developing and Developed Countries: A Resource Constraint Perspective. *Accounting Research Journal* 26(1): 6-34.
- Neuman, W. L. 1991. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Allyn and bacon. United States.
- Nielsen Global Survey. 2014. Doing Well by Doing Good. <https://www.nielsen.com/content/dam/niensenglobal/jp/docs/report/2014/Nielsen%20Global%20Corporate%20Social%20Responsibility%20Report%20-%20June%202014.pdf>. Diakses tanggal 10 April 2017.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. X.K.6 tentang Penyampaian Laporan

- Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik melalui Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK nomor: Kep-431/BL/2012.
- Raar, J. 2007. Reported Social and Environmental Taxonomies: A Longer-Term Glimpse. *Managerial Auditing Journal* 22(8): 840-860.
- Roberts, R. W. 1992. Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: An Application of Stakeholder Theory. *Accounting, Organizations and Society* 17(6): 595-612.
- Sayekti, Y. 2011. Strategic Corporate Social Responsibility (CSR): Slack Resources, Kinerja Keuangan, dan Earnings Response Coefficient. *Disertasi*. Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Sen, M., K. Mukherjee, dan J. K. Pattanayak. 2011. Corporate Environmental Disclosure Practices in India. *Journal of Applied Accounting Research* 12(2): 139-156.
- Suaryana, A. 2011. Implementasi Akuntansi Sosial dan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 6(1): 1-26.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wiseman, J. 1982. An Evaluation of Environmental Disclosures Made in Corporate Annual Reports. *Accounting, Organizations, and Society* 7(1): 53-63.
- Zuhroh, D. dan I. P. P. H. Sukmawati. 2003. Analisis Pengaruh Luas Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan terhadap Reaksi Investor. *Simposium Nasional Akuntansi VI* 2003.